

**JURISDIKSI *INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE*
DALAM PERKARA PENYADAPAN DI TIMOR
LESTE YANG MELIBATKAN UNSUR ASING**

TESIS

Diajukan Untuk Gelar Magister Hukum



Oleh :

**TOBIAS P. FERNANDES
322018701**

**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA
2018**



PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Tobias Pinto Fernandes**
NIM : **322018701** Email : **thoby_2003@yahoo.com**
Fakultas : **Hukum** Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul tugas akhir : **Jurisdiiksi *International Court Of Justice* Dalam Perkara Penyardapan Di Timor Leste Yang Melibatkan Unsur Asing**
Pembimbing : **1. Dr. Jeferson Kameo, S.H., LL.M.**
2. Arie Siswanto, SH., M.Hum.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Kristen Satya Wacana maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Satya Wacana.



Tobias Pinto Fernandes



PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Jl. Diponegoro 52 – 60 Salatiga 50711
Jawa Tengah, Indonesia
Telp. 0298 – 321212, Fax. 0298 321433
Email: library@adm.uksw.edu ; http://library.uksw.edu

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Tobias Pinto Fernandes.**
NIM : **322018701** Email : **thoby_2003@yahoo.com**
Fakultas : **Hukum** Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul tugas akhir : **Jurisdiiksi *International Court Of Justice* Dalam Perkara Penyardapan Di Timor Leste Yang Melibatkan Unsur Asing**

Dengan ini saya menyerahkan hak *non-eksklusif** kepada Perpustakaan Universitas – Universitas Kristen Satya Wacana untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak yang sesuai):

- ☒ a. Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA
- ☐ b. Saya tidak mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA**

* Hak yang tidak terbatasnya bagi satu pihak saja. Pengajar, peneliti, dan mahasiswa yang menyerahkan hak non-eksklusif kepada Repositori Perpustakaan Universitas saat mengumpulkan hasil karya mereka masih memiliki hak copyright atas karya tersebut.
** Hanya akan menampilkan halaman judul dan abstrak. Pilihan ini harus dilampiri dengan penjelasan/ alasan tertulis dari pembimbing TA dan diketahui oleh pimpinan fakultas (dekan/kaprodi).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Salatiga, 5 November 2018

Tobias Pinto Fernandes.

Mengetahui,

Dr. Jeferson Kameo, S.H., LL.M.

Arie Siswanto, SH., M.Hum.

Lembar Persetujuan

**JURISDIKSI *INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE*
DALAM PERKARA PENYADAPAN DI TIMOR LESTE
YANG MELIBATKAN UNSUR ASING**

TESIS

Diajukan Untuk Gelar Magister Hukum

Oleh :

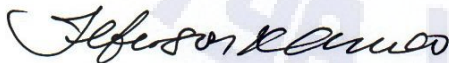
TOBIAS PINTO FERNANDES, SH.

322018701

Telah disetujui untuk diuji pada Tanggal 5 Bulan November Tahun 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Jeferson Kameo, SH., LL.M.



Arie Siswanto, SH., M.Hum.

Lembar Pengesahan

**JURISDIKSI *INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE*
DALAM PERKARA PENYADAPAN DI TIMOR LESTE
YANG MELIBATKAN UNSUR ASING**

TOBIAS PINTO FERNANDES, SH.

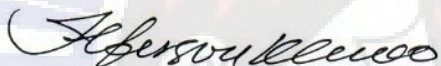
322018701

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Menyetujui

Penguji I

Penguji II



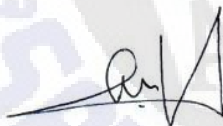
Dr. Jeferson Kameo, SH., LLM




Arie Siswanto, SH., M.Hum

Penguji III

Penguji IV



Ninon Melatyugra, SH., MH



Dr. Krishna D. Darumurti, SH., MH

Diuji Pada Tanggal 5 November 2018

Diketahui,

Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Tri Budiyono, SH., M.Hum.

Kata Pengantar

Atas berkat dan kasih yang berlimpah dari Tuhan Yesus Kristus maka penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Penulis memilih judul **“Jurisdiksi *International Court Of Justice* Dalam Perkara Penyadapan Di Timor Leste Yang Melibatkan Unsur Asing”** melalui tesis ini Penulis ingin memberikan suatu gambaran penyelesaian kasus pidana yang terjadi di wilayah domestik Timor Leste dan diselesaikan dengan menggunakan yurisdiksi hukum internasional. Hal ini merupakan suatu terobosan yang sangat penting dalam mencari suatu solusi atas permasalahan hukum antara negara yang hidup berdampingan seperti Australia dan Timor Leste, sehingga keadilan benar-benar ditegakkan.

Ucapan Terima Kasih

Pada bagian ini Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak di bawah ini yang telah mendukung Penulis dalam seluruh proses studi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga sampai penyelesaian tesis ini.

Bapak Arie Siswanto SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. Pak Arie bukan hanya sebagai Dekan tetapi sekaligus sosok yang menonjolkan nilai setara di dalam seluruh proses studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Kepada Dr. Jeferson Kameo SH., LL.M., selaku pembimbing I yang telah berkenan membimbing dan mengarahkan selama proses studi perkuliahan sampai tahap penyusunan tesis ini, dari awal sampai Penulis boleh menyelesaikan Tesis ini. Tak lupa pula terimakasih kepada Bu Novi dan Andrew.

Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum terlebih khusus Program Magister Hukum UKSW Salatiga yang telah mengajarkan ilmu hukum baik secara langsung dan tidak langsung. Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Seluruh Administrasi Fakultas Hukum UKSW Salatiga, Pak Umar, Mas Andri, Ibu Boni, terkhusus Mbak Widya, Pak Yusuf yang sudah banyak membantu, baik selama perkuliahan maupun saat penulisan tesis ini.

Khusus Penulis persembahkan untuk kedua orang tua Martinho Fernandes Pinto dan Lucilda de Almeida Fernandes (almh) serta adik-adik Lucas, Sofonias, Jeremias, Matias & Vincência yang telah berkorban, mendukung dan mendoakan Penulis.

Salatiga, 5 November 2018

Tobias Pinto Fernandes

Abstrak

Tindakan penyadapan oleh suatu negara asing dalam wilayah yurisdiksi domestik satu Negara merupakan suatu tindakan kriminal. Untuk menyelesaikan tindak pidana tersebut, dapat menempuh atau menggunakan hukum domestik dari Negara tempat terjadinya *locus delicti* tersebut. Model penyelesaian demikian itu mendasarkan diri kepada asas hukum pidana yang umum berlaku dalam setiap hukum pidana nasional, antara lain yaitu berdasarkan asas territorial. Asas ini, begitu pula hukum acara pidana untuk menegakkannya tersedia dalam yurisdiksi Nasional Negara berdaulat Timor-Leste. Jalur penyelesaian lainnya, dapat menggunakan mekanisme penyelesaian internasional dan hal ini didukung oleh Konstitusi Timor-Leste. Tesis ini mempertahankan dalil pilihan penggunaan jalur penyelesaian kedua, yang dimungkinkan karena tindak pidana penyadapan yang dilakukan unsur asing di dalam Negara Timor Leste; pihak Australia melakukan tindak pidana atas nama Negara. Forum tersebut adalah *International Court of Justice* (ICJ). Di ranah teoritis, penyelesaian dengan menggunakan ICJ membuktikan bahwa Timor-Leste lebih mengikuti ajaran monisme dengan primat internasional. Hukum internasional (ICJ) cenderung lebih disukai dibandingkan hukum nasional, sekalipun hukum nasional eksis dan berlaku.

Daftar Isi

JURISDIKSI <i>INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE</i> DALAM PERKARA PENYADAPAN DI TIMOR LESTE YANG MELIBATKAN UNSUR ASING	i
Pernyataan Tidak Plagiat	iii
Lembar Persetujuan Akses	iv
Lembar Persetujuan.....	v
Lembar Pengesahan	vi
Kata Pengantar	vii
Ucapan Terima Kasih.....	ix
Abstrak.....	xi
Daftar Isi	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Kerangka Teori	13
1.6. Metode Penelitian	20
BAB II.....	23
KONSTITUSI, HUKUM PIDANA MATERIIL DAN HUKUM ACARA PIDANA TIMOR-LESTE.....	23
2.1. Konstitusi Timor-Leste	24
2.2. KUHP Timor Leste (<i>Decree Law</i> No. 19 Tahun 2009)	28
2.2.1. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Materiil Timor Leste	29
2.2.2. Delik Pidana Penyadapan dalam KUHP Timor-Leste .	31
2.3. KUHAP Timor-Leste (<i>Decree-Law</i> No. 13 Tahun 2005) ..	35

2.3.1. Laporan adanya Dugaan Tindak Pidana.....	36
2.3.2. Tentang Tuduhan adanya Tindak Pidana.....	39
2.3.3. Tentang Penarikan Kembali Suatu Pengaduan	41
2.3.4. Prosedur Penahanan dan Penangkapan	43
2.3.5. Kewajiban Pelaporan Kepada Pengadilan	47
2.3.6. Penanganan Tindak Pidana Orang-Orang Tertentu	52
2.3.7. Sidang Pengadilan	56
2.3.8. Hukum Pembuktian	67
2.3.9. Keputusan Membuat Proses	75
2.3.10. Pelaksanaan Putusan Pengadilan	81
BAB III.....	87
JURISDIKSI <i>THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE</i>	
DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA	
PENYADAPAN YANG DILAKUKAN UNSUR ASING DALAM	
YURISDIKSI TIMOR-LESTE	87
3.1. Gambaran Singkat Prosedur Beracara di ICJ	87
3.1.1. Bentuk Pengajuan Perkara di ICJ (Mahkamah)	90
3.1.2. Kehadiran Para Pihak dalam Persidangan dan Putusan	94
3.1.3. Negara Berkepentingan dan Campur Tangan	97
3.1.4. Pelaksanaan Putusan.....	99
3.2. Penyelesaian Perkara Penyadapan <i>Australia vs Timor-Leste</i>	100
3.2.1. Proses Permulaan Penyelesaian Perkara Timor-Leste di ICJ	102
3.2.2. Pemilihan Hakim <i>Ad Hoc</i> oleh Para Pihak.....	103
3.2.3. Penentuan Yurisdiksi Menurut Pihak Timor-Leste	107
3.2.4. Tindakan Sementara Mahkamah Internasional	112
3.2.5. Proses Persidangan Putaran Pertama dan Petisi	114
3.3. Analisis	195
BAB IV	199

PENUTUP	199
4.1. Kesimpulan	199
4.2. Saran	200
DAFTAR PUSTAKA	203
1. Buku-Buku	203
2. Peraturan Perundang-Undangan	204
3. Perjanjian Internasional	205

